

# BRIEFING SUBSIDI ENERGI INDONESIA

Sebuah kajian dwi-bulanan tentang kebijakan subsidi energi Indonesia dan pasar energi

## April 2016

Sebagai bagian dari kerjanya di bidang kebijakan energi dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, the Global Subsidies Initiative (GSI) dari International Institute for Sustainable Development (IISD) menerbitkan briefing rutin tentang isu terkait subsidi energi. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Lucky Lontoh di [lucky.lontoh@iisd.org](mailto:lucky.lontoh@iisd.org).

### Sorotan

- Pada 30 Maret lalu, pemerintah mengumumkan harga baru bahan bakar bersubsidi yang berlaku pada 1 April 2016.
- Perubahan harga pada bulan April adalah untuk kedua kalinya sejak pemerintah mengumumkan akan mengevaluasi dan menyesuaikan harga bahan bakar bersubsidi setiap tiga bulan sekali pada November 2015.
- Pemerintah mempertimbangkan untuk mereformasi subsidi diesel. Penghapusan penuh subsidi diesel diperkirakan akan menghemat Rp16 triliun (USD1,21 miliar) anggaran pemerintah.
- Perusahaan-perusahaan batubara meminta pemerintah mensubsidi batubara, namun permintaan ini ditentang oleh berbagai organisasi masyarakat sipil.

### Perubahan Harga Bahan Bakar Bulan April

Pada 30 Maret lalu, Pemerintah Indonesia mengumumkan harga baru bahan bakar bersubsidi yang akan mulai berlaku pada 1 April 2016. Harga baru tersebut mencakup harga bensin Premium, (RON 88) dan diesel otomotif Solar, (CN 48) yang diturunkan sebesar Rp500 per liter (USD0,04). Adapun harga minyak tanah masih sama, yaitu Rp2.500, per liter (USD0,19) (Antara, 2016).

Perubahan harga pada bulan April merupakan untuk kedua kalinya pemerintah mengumumkan akan mengevaluasi dan menyesuaikan harga bahan bakar bersubsidi setiap tiga bulan sekali penyesuaian sejak November 2016. Pada pengumuman tersebut, pemerintah juga menjelaskan bahwa harga bahan bakar di Indonesia menduduki peringkat 16 terendah dari 173 negara di seluruh dunia, serta ketiga terendah di antara negara-negara ASEAN (Kementerian ESDM, 2016).

Sepanjang 2015, pemerintah Indonesia berusaha merancang seberapa sering penyesuaian harga bahan bakar bersubsidi harus dilakukan, dan akhirnya memutuskan akan melakukannya setiap tiga bulan sekali.

Tabel 1: Penyesuaian Harga Bahan Bakar Bersubsidi Indonesia pada April 2016

Tipe Bahan Bakar Bersubsidi	Harga Januari 2016 (Rp/liter)	Harga April 2016 (Rp/liter)
Bensin (RON 88) – untuk daerah luar	6,950 (USD 0.52)	6,450 (USD 0.49)
Diesel Otomotif (CN 48)	5,650 (USD 0.42)	5,150 (USD 0.39)
Minyak Tanah	2,500 (USD 0.2)	2,500 (USD 0.2)

Sumber: Kementerian ESDM, 2016.

Perubahan harga terakhir pada bulan April dilakukan sesuai jadwal, menyusul perubahan harga bahan bakar sebelumnya pada 5 Januari 2016. Tanda-tanda perubahan harga juga telah tampak jelas di sepanjang bulan Maret, yaitu ketika PT Pertamina melaporkan bahwa mereka telah diinstruksikan oleh pemerintah untuk bersiap-siap menurunkan harga bahan bakar domestik pada 1 April 2016 (CNN Indonesia, 2016). Pesan yang sama juga ditegaskan kembali oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman

Said, yang pada 24 Maret 2016 mengumumkan bahwa harga bahan bakar bersubsidi akan disesuaikan pada bulan April (Kementerian Energi, 2016).

Harga bahan bakar bersubsidi terus menjadi topik perdebatan di Indonesia. Baru-baru ini Bank Dunia memprediksi bahwa pendapatan negara akan meleset sebesar Rp275 triliun (USD20.8 miliar) dari target yang seharusnya diterimanya pada 2016. Hal ini membuat Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo, mendorong pemerintah untuk meningkatkan upayanya untuk memperbaiki mekanisme penetapan harga bahan bakar yang baru yang dilaksanakan setelah reformasi subsidi pada Januari 2015, dengan tujuan untuk mengamankan APBN 2016, serta meningkatkan peringkat kredit Indonesia dalam penilaian lembaga pemeringkat internasional, Standard and Poor's. Menurut Agus Martowardojo, hal tersebut akan membantu Indonesia menarik investasi internasional yang amat diperlukan serta mengurangi biaya peminjaman, yang akan sama-sama merangsang pertumbuhan (Jakarta Globe, 2016).

Sebelumnya, kebijakan-kebijakan subsidi bahan bakar Indonesia selalu menyebabkan beban fiskal yang berat, dan sangat mempengaruhi peringkat kredit maupun kinerja ekonomi Indonesia secara umum. Sebelum reformasi pada bulan Januari 2015, subsidi bahan bakar yang diberikan kepada bensin, diesel, minyak tanah, dan LPG 3kg, menjadi salah satu pos pengeluaran terbesar di APBN, yaitu sebesar 18 persen dari belanja total pemerintah pada 2013 dan 2014.

### Akankah Reformasi Subsidi Diesel Menyusul?

Selain penyesuaian harga baru-baru ini, pemerintah juga sedang mempertimbangkan mereformasi kebijakan subsidi dieselnnya. Pada 2015, pemerintah mengubah subsidi diesel dari sistem harga tetap menjadi sistem subsidi tetap, yaitu dengan memberikan subsidi sebesar Rp1.000 per liter (USD0,08) untuk diesel otomotif yang dijual PT Pertamina. Dengan kuota tahunan sebesar 16 juta kiloliter. Penghapusan subsidi diesel diperkirakan akan menghemat belanja pemerintah sebesar Rp16 triliun (USD1,21 miliar).

Menurut Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian ESDM, Ir. Sujatmiko, sebagian dari dana yang dihemat dari reformasi subsidi diesel akan ditransfer ke Program Indonesia Terang (PIT) yang bertujuan meningkatkan tingkat elektrifikasi Indonesia dari 85 persen pada 2015 menjadi 97 persen pada 2019 (Republika, 2016).

Namun rencana tersebut terpaksa ditunda sehubun-

**Tabel 2: Alokasi Subsidi Bahan Bakar Indonesia dalam APBN 2013-2015 (Rp, USD/miliar)**

Produk Energi	2013 (APBN Audit)	2014 (APBN Audit)	2015 (APBN Revisi)
Bensin Premium	99,564.30 (USD 7.54)	108,957.69 (USD 8.25)	64,674.80 (USD 4.90)
Diesel Solar	73,200.55 (USD 5.55)	74,860.54 (USD 5.67)	
Minyak tanah	6,253.11 (USD 0.47)	7,200.49 (USD 0.55)	
LPG 3kg	30,982.03 (USD 2.35)	48,975.34 (USD 3.71)	
Subtotal Subsidi Bahan Bakar	209,999.99 (USD 15.91)	239,994.06 (USD 18.18)	
Listrik	99,979.71 (USD 7.57)	101,816.32 (USD 7.71)	73,149.20 (USD 5.54)
Total Subsidi Energi	309,979.70 (USD 23.48)	341,810.38 (USD 25.89)	137,824.00 (USD 13.80)
Total Belanja Pemerintah Pusat	1,137,162.90 (USD 86.15)	1,280,368.60 (USD 97.00)	1,392,442.3 (USD 105.49)

Sumber: APBN Revisi 2015; APBN 2016.

gan mendekatnya bulan suci Ramadhan yang akan dimulai pada bulan Juni. Sebagaimana diketahui, selama bulan Ramadhan, harga-harga cenderung naik, dan reformasi subsidi diesel sengaja ditunda agar tidak memberikan tekanan inflasi tambahan. Akan tetapi, pemerintah tetap akan meneruskan pembicaraan tentang reformasi subsidi diesel dengan parlemen maupun seluruh pemangku kepentingan pada bulan-bulan setelahnya.

### Tarif Transportasi Publik Turun Menyusul Penyesuaian Harga Bahan Bakar

TPengumuman perubahan harga bahan bakar bersubsidi pada 30 Maret 2016 lalu disusul dengan penyesuaian tarif transportasi publik oleh Kementerian Transportasi. Langkah ini telah mendapat persetujuan resmi dari Presiden Jokowi (Merdeka, 2016). Pada awal April lalu, Menteri Transportasi, Ignasius Jonan, mengumumkan bahwa mulai 7 April, tarif transportasi antar-provinsi akan diturunkan sebesar 3,5 persen, se-

mentara tarif transportasi antar-pulau akan diturunkan sebesar 3,38 persen (BeritaSatu, 2016). Kementerian Transportasi menyatakan bahwa alasan utama penurunan tarif tersebut adalah rendahnya harga minyak, sementara Menteri Jonan juga mengeluarkan surat edaran yang menginstruksikan pemerintah-pemerintah daerah untuk menurunkan tarif transportasi publik di daerah masing-masing (Republika, 2016).

Hubungan antara harga bahan bakar Indonesia dan tarif transportasi publik, yang sama-sama diatur oleh pemerintah, selalu menjadi topik sensitif dalam politik Indonesia. Pada Juli 2013, ketika terjadi kenaikan harga bahan bakar, tarif transportasi diizinkan untuk naik sebesar 20 persen, walaupun Organda menyatakan bahwa tarif seharusnya dinaikkan sebesar 35 persen. Demikian pula, pada 2014, menyusul kenaikan harga bahan bakar, Organda mengorganisasi mogok massal nasional karena pemerintah tidak mengizinkan operator transportasi, termasuk perusahaan-perusahaan taksi kecil dan ojek, untuk menaikkan tarif mereka untuk menghadapi harga bahan bakar baru tersebut (GSI, 2015; GSIa, 2015).

#### Perusahaan Batubara Menuntut Subsidi dari Pemerintah

Pada 7 Maret 2016, Asosiasi Pengusaha Batu Bara Indonesia (APBI-ICMA) mengumumkan hasil penelitian yang mereka lakukan bersama PricewaterhouseCoopers terkait kesiapan industri batubara untuk memasok 20 GW kapasitas listrik baru sebagai bagian dari rencana pemerintah untuk mengadakan pembangkit listrik sebesar 35GW.

Laporan ini antara lain didasarkan pada survei terbatas terhadap perusahaan-perusahaan tambang serta wawancara terhadap para penambang dan produsen batubara. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa dengan harga batubara yang rendah saat ini, perusahaan batubara harus mengurangi eksplorasi mereka sebesar 29 persen dibandingkan pada 2012, yang akan menyebabkan habisnya cadangan batubara pada 2033-2036. Hal ini dipandang akan mengganggu kemampuan para produsen untuk memasok batubara dalam jumlah cukup dalam rangka memenuhi kebutuhan kapasitas pembangkit listrik tenaga batubara 20 GW sebagai bagian dari program 35 GW pemerintah. Atas dasar inilah, APBI-ICMA menuntut pemerintah untuk mendukung perusahaan-perusahaan tambang batubara dengan memperkenalkan sistem "penetapan harga berdasar biaya/cost-based-pricing" untuk menyubsidi ekstraksi batubara (Indonesian Coal Association, 2016).

Hanya dalam tiga hari setelah pengumuman tersebut, APBI-ICAM bertemu Menteri Sudirman Said untuk menyampaikan rekomendasi secara langsung. Menteri Sudirman Said menjawab secara diplomatis bahwa masalah utamanya bukanlah kelangkaan batubara, namun justru karena ekstraksi batubara tidak lagi layak (viable) secara ekonomi pada tingkat harga tertentu. Menteri Sudirman Said kemudian menjanjikan akan memfasilitasi pembicaraan antara para produsen batubara, produsen listrik, dan PT PLN untuk menemukan solusi terbaik untuk masalah ini (Kementerian ESDM, 2016).

Permintaan APBI-ICMA untuk menyubsidi perusahaan batubara dengan secara artifisial meningkatkan harga batubara domestik segera mengundang reaksi negatif dari berbagai organisasi masyarakat sipil. Dalam sebuah jumpa pers pada 10 Maret 2016, Greenpeace Indonesia dengan tegas menentang tuntutan APBI-ICMA atas landasan aspek lingkungan dan ekonomi. Greenpeace Indonesia mengutip bahwa keuntungan kotor perusahaan tambang secara umum pada 2011 adalah sebesar USD6,5 miliar, dan memperkirakan bahwa tuntutan membebaskan biaya tambahan (sur-charging) atas harga batubara domestik tersebut akan menambah beban kepada pembayar pajak Indonesia sebesar USD230 juta hingga USD680 juta per tahun. Dengan tegas, Greenpeace Indonesia juga mengkritik usulan penelitian tersebut untuk mendanai subsidi bahan bakar melalui dana pensiun Indonesia.

Selain itu, Greenpeace Indonesia juga menyatakan bahwa tuntutan dari APBI-ICMA tersebut sebenarnya semakin menegaskan fakta bahwa Indonesia harus berhenti mutlak menggunakan batubara, karena sumber pembiayaan batubara sudah mulai menipis dan menjadi beban fiskal yang amat besar karena menjadi aset terdampar (stranded asset). Greenpeace Indonesia justru mendorong pemerintah untuk mencari sumber energi bersih, dengan mengutip pengalaman India dalam mengembangkan kapasitas tenaga surya yang secara biaya lebih kompetitif.

Sesungguhnya dari perspektif internasional, pengalaman juga menunjukkan bahwa negara-negara sudah mulai meninggalkan batubara. Cina misalnya, telah mengubah kebijakannya terkait batubara setelah menghadapi protes keras masyarakat terkait dampak kesehatan polusi pembangkit listrik batubara, dan baru-baru ini memutuskan untuk menghentikan perizinan pembukaan tambang batubara baru selama tiga tahun. Pemerintah Cina juga memerintahkan 15 provinsi untuk menghentikan pembangunan pembangkit listrik yang ijinnya telah disetujui.

## Pengakuan Internasional atas Upaya Reformasi Indonesia

Upaya Indonesia untuk mengurangi subsidi bahan bakar fosil bagi konsumen di bawah pemerintahan Jokowi telah menarik perhatian internasional yang signifikan selama satu tahun terakhir. Baru-baru ini Wakil Presiden Swiss, Doris Leuthard, dalam pertemuan dengan Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Rida Mulyana, di Jakarta, menyatakan bahwa Pemerintah Swiss mengapresiasi langkah yang diambil oleh Indonesia dalam mereformasi subsidi dan memuji perkembangan yang telah dicapai hingga saat ini. Pertemuan tersebut berlangsung pada 31 Maret, hanya satu hari setelah harga baru bahan bakar bersubsidi diumumkan oleh pemerintah.

## References

- Antara. (2016, March 30). Pemerintah turunkan harga premium dan solar . Retrieved from <http://www.antaranews.com/berita/552579/pemerintah-turunkan-harga-premium-dan-solar>
- BeritaSatu. (2016, April 3). Bahas Harga Batu Bara, APBI dan PLN Sebaiknya Dipertemukan. Retrieved from <http://www.beritasatu.com/ekonomi/358114-bahas-harga-batu-bara-apbi-dan-pln-sebaiknya-dipertemukan.html>
- BeritaSatu. (2016, March 31). Pemerintah Swiss Apresiasi Pencabutan Subsidi BBM di Indonesia. Retrieved from <http://www.beritasatu.com/ekonomi/357682-pemerintah-swiss-apresiasi-pencabutan-subsidi-bbm-di-indonesia.html>
- BeritaSatu. (2016, April 1). Tarif AKAP Turun 3,5%. Retrieved from <http://www.beritasatu.com/makro/357806-tarif-akap-turun-35.html>
- CNN Indonesia. (2016, March 1). Pertamina Turunkan Harga Premium dan Solar Mulai Bulan Depan. Retrieved from <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160301080653-85-114466/pertamina-turunkan-harga-premium-dan-solar-mulai-bulan-depan/>
- Energy Desk. (2016, March). Retrieved from <http://energydesk.greenpeace.org/2016/03/24/china-crackdown-new-coal-power-plants/>
- Greenpeace Indonesia. (2016, March 10). Greenpeace Mengancam Imbauan Subsidi Perusahaan Batubara. Retrieved from <http://www.greenpeace.org/seasia/id/press/releases/Greenpeace-Mengancam-Imbauan-Subsidi-Perusahaan-Batubara-/>
- GSI. (2015, February). Indonesia Energy Subsidy Briefing, February 2015. Retrieved from [https://www.iisd.org/gsi/sites/default/files/ffs\\_newsbriefing\\_indonesia\\_feb2015\\_eng.pdf](https://www.iisd.org/gsi/sites/default/files/ffs_newsbriefing_indonesia_feb2015_eng.pdf)
- GSI-a. (2015). IISD. Retrieved from [http://www.iisd.org/gsi/sites/default/files/ffs\\_indonesia\\_msms.pdf](http://www.iisd.org/gsi/sites/default/files/ffs_indonesia_msms.pdf)
- Indonesian Coal Association. (2016, March 7). Press release APBI-ICMA(Joint Study of APBI-ICMA and PricewaterhouseCoopers). Retrieved from <http://www.apbi-icma.org/en/siaran-pers-apbi-icma-kajian-bersama-apbi-icma-dan-pricewaterhousecoopers/>
- Jakarta Globe. (2016, March 18). Bank Indonesia Chief Calls on Government to Address Fiscal Concerns. Retrieved from <http://jakartaglobe.beritasatu.com/business/bank-indonesia-chief-calls-government-address-fiscal-concerns/>
- Katadata. (2016, March 14). Harga Minyak Rendah, Pemerintah Berencana Cabut Subsidi Solar. Retrieved from <http://katadata.co.id/berita/2016/03/14/harga-minyak-rendah-pemerintah-berencana-cabut-subsidi-solar#sthash.Njp6JEMR.dpbs>
- Merdeka. (2016, March 30). Ikuti harga BBM, Jokowi minta Jonan turunkan tarif angkutan umum. Retrieved from <http://www.merdeka.com/uang/ikuti-harga-bbm-jokowi-minta-jonan-turunkan-tarif-angkutan-umum.html>
- Ministry of Energy. (2016, March 24). Harga LPG Stabil, Harga BBM akan Turun Signifikan . Retrieved from [http://www.esdm.go.id/berita/migas/40-migas/8270-harga-lpg-stabil-harga-bbm-akan-turun-signifikan.html?utm\\_source=twitterfeed&utm\\_medium=twitter](http://www.esdm.go.id/berita/migas/40-migas/8270-harga-lpg-stabil-harga-bbm-akan-turun-signifikan.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter)
- Ministry of Energy and Mineral Affairs. (2016, March 10). Pemerintah akan "Jembatani" Diskusi Antara PLN dan IPP dengan Pengusaha Batubara. Retrieved from <http://www.esdm.go.id/berita/batubara/44-batubara/8234-pemerintah-akan-jembatani-diskusi-antara-pln-dan-ipp-dengan-pengusaha-batubara.html>
- Ministry of Energy and Mineral Resources. (2016, March 30). Siaran Pers Nomor: 00026.Pers/04/SJI/2016 Tanggal: 30 Maret 2016. Retrieved from <http://esdm.go.id/siaran-pers/55-siaran-pers/8291-penetapan-harga-bbm-berlaku-1-april-2016.html>
- Republika. (2016, April 1). Jonan Buat Surat Edaran ke Pemda untuk Turunkan Tarif Angkutan. Retrieved from <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/16/04/01/o4y6ab382-jonan-buat-surat-edaran-ke-pemda-untuk-turunkan-tarif-angkutan>
- Republika. (2016, April 1). Subsidi BBM Dialihkan untuk Listrik. Retrieved from <http://www.republika.co.id/berita/koran/publik/16/04/01/o4y3ka22-subsidi-bbm-dialihkan-untuk-listrik>
- Reuters. (2016). Retrieved from <http://www.reuters.com/article/us-china-power-renewables-idUSKCN0WU0RF>

Sindonews. (2015, October 2). Agus Marto Minta Jokowi Konsisten soal Harga BBM Premium. Retrieved from <http://ekbis.sindonews.com/read/1049861/34/agus-marto-minta-jokowi-konsisten-soal-harga-bbm-premium-1443772714>

Tambang. (2016, March 7). Harga Batubara Turun, PLTU di Proyek 35 GW Bakal Kekurangan Pasokan. Retrieved from <http://www.tambang.co.id/harga-batubara-turun-pltu-di-proyek-35-gw-bakal-kekurangan-pasokan-10794/>

Published by the International Institute for Sustainable Development.

International Institute for Sustainable Development  
Head Office

161 Portage Avenue East, 6th Floor, Winnipeg, Manitoba, Canada R3B 0Y4  
Tel: +1 (204) 958-7700 | Fax: +1 (204) 958-7710 | Web site: [www.iisd.org](http://www.iisd.org)

#### About IISD

The International Institute for Sustainable Development (IISD) contributes to sustainable development by advancing policy recommendations on international trade and investment, economic policy, climate change and energy, and management of natural and social capital, as well as the enabling role of communication technologies in these areas. We report on international negotiations and disseminate knowledge gained through collaborative projects, resulting in more rigorous research, capacity building in developing countries, better networks spanning the North and the South, and better global connections among researchers, practitioners, citizens and policy-makers.

IISD's vision is better living for all—sustainably; its mission is to champion innovation, enabling societies to live sustainably. IISD is registered as a charitable organization in Canada and has 501(c)(3) status in the United States. IISD receives core operating support from the Government of Canada, provided through the Canadian International Development Agency (CIDA), the International Development Research Centre (IDRC), and from the Province of Manitoba. The Institute receives project funding from numerous governments inside and outside Canada, United Nations agencies, foundations and the private sector.

#### About GSI

GSI is an initiative of the International Institute for Sustainable Development (IISD). GSI puts a spotlight on subsidies—transfers of public money to private interests—and how they impact efforts to put the world economy on a path toward sustainable development. In cooperation with a growing international network of research and media partners, GSI seeks to lay bare just what good or harm public subsidies are doing; to encourage public debate and awareness of the options that are available for reform; and to provide policy-makers with the tools they need to secure sustainable outcomes for our societies and our planet.

International Institute for Sustainable Development  
Global Subsidies Initiative  
International Environment House 2  
9 chemin de Balexert, 1219 Châtelaine,  
Geneva, Switzerland

[cbeaton@iisd.org](mailto:cbeaton@iisd.org)  
[lucky.lontoh@iisd.org](mailto:lucky.lontoh@iisd.org)

Tel: +41 22 917-8373  
Fax: +41 22 917-8054

<http://www.iisd.org/gsi/>